

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi dipahami selaku kemampuan suatu perekonomian nasional guna mengubah keadaan ekonominya yang semula relatif tetap dalam jangka waktu cukup panjang menjadi dinamis, melalui peningkatan dan pemeliharaan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB) pada kisaran 5-7 % per tahun. Dalam perspektif ini, pembangunan bukan hanya soal pertumbuhan kuantitatif tetapi juga kapasitas ekonomi untuk menopang peningkatan pendapatan nasional riil secara berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi ialah indeks sentral dalam menaksir kemajuan pembangunan suatu negara, sebab menyatukan dimensi produksi, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat dalam satu kerangka pengukuran yang komprehensif (Raskina & Saharuddin, 2022).

Pertumbuhan ekonomi umumnya diukur melewati peningkatan pendapatan nasional riil, yang dalam praktiknya tercermin pada perubahan nilai PDB. PDB ialah angka total barang serta jasa akhir yang dibuat di suatu negara dalam satu warsa memakai sumber daya produksi yang tersedia di dalam negeri maupun dari manca negara. Kenaikan PDB menunjukkan ekspansi proses produksi yang berarti ekonomi bergerak lebih dinamis dan menciptakan lebih banyak nilai tambah, sebaliknya, penurunan PDB mengindikasikan kontraksi aktivitas ekonomi (Raskina dan Saharuddin, 2022). Dalam konteks kebijakan, PDB berfungsi sebagai alat ukur utama untuk menilai keberhasilan Pembangunan sekaligus sebagai dasar penyusunan strategi ekonomi jangka menengah maupun jangka panjang.

Tabel 1.1 PDB *Purchasing Power Parity* Negara ASEAN Tahun 2024

No.	Negara	PDB Total	PDB Per Kapita
1.	Indonesia	\$4.660,00 miliar	\$16.448
2.	Thailand	\$1.770,00 miliar	\$24.708
3.	Vietnam	\$1.650,00 miliar	\$16.386
4.	Malaysia	\$1.380,00 miliar	\$38.729
5.	Filiphina	\$1.370,00 miliar	\$11.794
6.	Singapura	\$909,69 miliar	\$150.689
7.	Myanmar	\$326,86 miliar	\$5.997
8.	Kamboja	\$140,58 miliar	\$7.970
9.	Laos	\$76,05 miliar	\$9.788
10.	Brunei Darussalam	\$41,65 miliar	\$90.007
11.	Timor Leste	\$6,66 miliar	\$4.758

Sumber: Worldometer, 2024 (data diolah)

Berlandaskan tabel 1.1 Indonesia ialah negara dengan angka PDB terbesar di wilayah ASEAN, yaitu mencapai USD 4.660 miliar pada tahun 2024. Namun, apabila ditinjau berdasarkan PDB per kapita, Indonesia masih berada di bawah beberapa negara ASEAN semacam Singapura, Brunei Darussalam, serta Malaysia (Worldometer, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa besarnya ukuran perekonomian suatu negara tidak selalu diikuti oleh tingginya tingkat pendapatan rata-rata penduduk. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya ditetapkan oleh besarnya output yang dihasilkan, namun juga oleh kemampuan suatu negara dalam mendistribusikan hasil pembangunan kepada seluruh masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami sumber pembentuk perekonomian nasional secara lebih mendalam, diperlukan analisis pada tingkat wilayah karena pertumbuhan ekonomi nasional pada dasarnya merupakan akumulasi dari kinerja ekonomi daerah-daerah di Indonesia.

Pada tingkat sub-nasional, pertumbuhan ekonomi nasional sering didukung oleh dinamika pertumbuhan di tiap wilayah, yang dapat diukur melewati Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merepresentasikan angka barang beserta jasa yang diwujudkan dalam suatu daerah periode tertentu, dengan memakai sumber daya produksi yang ada di wilayah tersebut, sehingga mencerminkan tingkat kemajuan pembangunan daerah secara agregat (Sari, Swastika dan Yunarti, 2025). PDRB tidak hanya menggambarkan total output regional, tetapi juga struktur sektoral dan kontribusi sektor-sektor kunci, termasuk pariwisata, jasa, industri, dan pertanian, yang selalu berubah sesuai dengan pengelolaan sumber daya alam dan faktor produksi lokal. Dengan demikian, perubahan PDRB dari waktu ke waktu menjadi cerminan ekspansi atau kontraksi aktivitas produksi secara keseluruhan, sehingga menjadi indikator vital untuk menilai kinerja pembangunan di daerah-daerah di Indonesia.

**Tabel 1.2 PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2020-2024
(miliar rupiah)**

Tahun	Pulau Jawa	Pulau Sumatra	Pulau Kalimantan	Pulau Sulawesi	Kepulauan Maluku dan Papua	Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara
2020	6.365.138,72	2.337.347,68	897.680,85	704.378,75	258.188,74	309.597,43
2021	6.598.147,92	2.375.795,83	926.726,15	744.283,49	284.584,45	309.850,10
2022	6.948.657,85	2.487.262,92	972.490,18	796.887,46	309.261,27	325.615,71
2023	7.293.178,28	2.603.834,05	1.025.279,93	847.658,87	331.153,60	338.617,16
2024	7.652.457,69	2.719.709,68	1.081.985,14	900.027,14	357.230,85	355.775,52

Sumber: BPS Indonesia, 2026 (data diolah)

Berlandaskan tabel 1.2 Pulau Jawa secara konsisten menjadi kontributor terbesar terhadap perekonomian Indonesia selama periode 2020–2024. Nilai PDRB Pulau Jawa meningkat dari Rp6.365.138,72 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp7.652.457,69 miliar pada tahun 2024, jauh melampaui kontribusi pulau-pulau lainnya (BPS Indonesia, 2026b). Dominasi Pulau Jawa sebagai pusat ekonomi nasional memang tidak dapat dipisahkan dari jumlah penduduk yang lebih besar

dibandingkan pulau lainnya, namun fakta menarik terdapat pada produktivitas ekonomi per wilayahnya. Meskipun Pulau Sumatra terdiri atas 10 provinsi sedangkan Pulau Jawa hanya 6 provinsi, kontribusi ekonomi Pulau Jawa hampir tiga kali lebih besar dibandingkan Pulau Sumatra yang merupakan penyumbang terbesar kedua. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi nasional masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan, industri, perdagangan, jasa, dan investasi di Indonesia. Fakta ini mengindikasikan bahwa produktivitas dan kapasitas ekonomi per wilayah di Pulau Jawa relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya sehingga mampu menyumbangkan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDB nasional. Namun demikian, besarnya kontribusi ekonomi suatu wilayah belum tentu mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang merata di dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, selain melihat besaran PDRB, perlu dilakukan analisis terhadap indikator yang mampu menggambarkan tingkat kemakmuran penduduk secara lebih spesifik, yaitu pendapatan atau PDRB per kapita.

Menurut Sari dan Setyowati, (2022) pendapatan per kapita merupakan indikator yang didapatkan dari pembagian nilai PDRB dengan total penduduk pada wilayah. Indikator ini sering digunakan untuk menggambarkan rata-rata kemampuan ekonomi masyarakat serta tingkat kemakmuran daerah. Berbeda dengan PDRB yang menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi secara agregat, PDRB per kapita memberikan gambaran mengenai hasil pembangunan ekonomi yang dinikmati oleh setiap penduduk. Dengan demikian, analisis PDRB per kapita diperlukan untuk mengetahui apakah tingginya aktivitas ekonomi di Pulau Jawa juga diikuti oleh tingkat kesejahteraan masyarakat relatif tinggi di setiap provinsi.

Tabel 1.3 PDRB Per Kapita Menurut Harga Konstan 2010 Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2014-2024 (ribu rupiah)

Tahun	DKI Jakarta	Jawa Timur	Banten	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI Yogyakarta
2014	136.312	32.703	29.846	24.967	22.819	21.868
2015	142.913	34.272	30.813	25.845	23.887	22.688
2016	149.832	35.971	31.782	26.924	24.959	23.566
2017	157.637	37.724	32.948	27.971	26.089	24.534
2018	165.769	39.580	34.184	29.160	27.285	25.776
2019	174.813	41.512	35.914	30.413	28.696	27.009
2020	170.089	39.686	37.165	30.181	26.484	27.754
2021	175.005	40.780	38.339	30.935	27.093	29.116
Rata-Rata	159.046	37.779	33.874	28.300	25.914	25.289

Sumber: BPS Indonesia, 2025 (data diolah)

Berlandaskan tabel 1.3 terdapat perbedaan tingkat PDRB per kapita yang cukup mencolok antarprovinsi di Pulau Jawa selama periode 2014–2021. DKI Jakarta mempunyai rata-rata PDRB per kapita tertinggi sebesar Rp159,046, diikuti Jawa Timur sebesar Rp37,779 dan Banten sebesar Rp33,874 (BPS Indonesia, 2026a). Sementara itu, Provinsi DIY memiliki rata-rata PDRB per kapita terendah, yaitu sebesar Rp25,289. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi nasional, tingkat kesejahteraan ekonomi yang tercermin melewati PDRB per kapita masih memperlihatkan disparitas antarprovinsi. Rendahnya PDRB per kapita Provinsi DIY mengindikasikan bahwa nilai tambah ekonomi yang dihasilkan per penduduk relatif lebih kecil disejajarkan provinsi lain di Pulau Jawa.

Perbedaan capaian PDRB per kapita di Pulau Jawa tidak terlepas dari karakteristik ekonomi yang dimiliki masing-masing provinsi. Dalam hal ini, Provinsi DIY memiliki struktur perekonomian yang berbeda dibandingkan sebagian besar provinsi di Pulau Jawa yang didominasi sektor industri manufaktur dan

perdagangan berskala besar. Provinsi DIY diketahui sebagai kota pelajar serta destinasi wisata utama nasional yang didukung oleh keberadaan berbagai perguruan tinggi, kekayaan budaya, serta beragam objek wisata unggulan (Puspadewi dan Natalia, 2023). Oleh karena itu, aktivitas ekonomi di Provinsi DIY lebih banyak ditopang oleh sektor pendidikan, pariwisata, dan jasa, yang membentuk karakteristik pembangunan ekonomi yang khas dipadankan provinsi lain di Pulau Jawa.

Meskipun PDRB per kapita kerap dimanfaatkan sebagai indikator guna menggambarkan tingkat kemakmuran suatu daerah, ukuran ekonomi tersebut belum sepenuhnya mampu menjelaskan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam perkembangannya, keberhasilan pembangunan tidak hanya dinilai dari besarnya pendapatan yang dihasilkan, namun juga dari kemampuan masyarakat dalam mencapai kualitas hidup yang baik. Oleh karena itu, selain indikator ekonomi, diperlukan indikator kesejahteraan subjektif yang dapat menggambarkan bagaimana masyarakat menilai kehidupannya secara keseluruhan. Salah satu parameter yang dimanfaatkan guna menafsirkan kesejahteraan subjektif tersebut adalah indeks kebahagiaan yang disusun oleh BPS melalui Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK). Menurut Indah dan Magriasti, (2023) indeks kebahagiaan ialah indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga perspektif utama, yakni kepuasan hidup (*life satisfaction*), perasaan (*affect*), beserta makna hidup (*eudaimonia*). Survei ini dilaksanakan secara nasional pada tahun 2014, 2017, beserta 2021 untuk mengukur tingkat kebahagiaan masyarakat di setiap provinsi Indonesia.

Tabel 1.4 Indeks Kebahagiaan Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2014, 2017, dan 2021 (persen)

Provinsi	2014	2017	2021	Rata-Rata
DI Yogyakarta	70,77	72,93	71,70	71,80
Jawa Timur	68,70	70,77	72,08	70,52
DKI Jakarta	69,21	71,33	70,68	70,41
Jawa Tengah	67,81	70,92	71,73	70,15
Jawa Barat	67,66	69,58	70,23	69,16
Banten	68,24	69,83	68,08	68,72

Sumber: BPS Indonesia, 2022 (data diolah)

Berlandaskan tabel 1.4 Provinsi DIY memiliki rata-rata indeks kebahagiaan tertinggi di Pulau Jawa selama periode pengukuran tahun 2014, 2017, dan 2021, yaitu sebesar 71,80 persen. Nilai tersebut lebih tinggi dipadankan provinsi lain di Pulau Jawa. Selain memiliki rerata tertinggi, menurut BPS Indonesia, (2022) provinsi DIY juga mencatatkan nilai indeks kebahagiaan tertinggi pada tahun 2014 dan 2017. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi DIY memiliki tingkat kepuasan hidup, kondisi emosional, serta makna hidup yang relatif lebih baik disejajarkan masyarakat di provinsi lain di Pulau Jawa. Tingginya indeks kebahagiaan di Provinsi DIY dapat dijelaskan melalui tiga dimensi utama yang membentuk indeks tersebut. Pada dimensi kepuasan hidup (*life satisfaction*), masyarakat Provinsi DIY menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap kualitas kehidupan mereka, yang dipengaruhi oleh ketersediaan lingkungan sosial yang kuat, akses terhadap pendidikan berkualitas melalui berbagai perguruan tinggi, serta kemudahan akses terhadap fasilitas kesehatan dan budaya. Pada dimensi perasaan (*affect*), masyarakat Provinsi DIY mengalami kondisi emosional yang lebih positif dengan frekuensi perasaan bahagia dan senang yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lain, yang dipengaruhi oleh iklim budaya yang hangat,

tradisi kearifan lokal yang masih kuat, dan gaya hidup yang lebih santai dibandingkan kota metropolitan seperti Jakarta. Pada dimensi makna hidup (*eudaimonia*), masyarakat Provinsi DIY memiliki persepsi yang lebih baik tentang tujuan dan makna kehidupan mereka, yang tercermin dari akses terhadap pendidikan yang merata, partisipasi dalam kegiatan budaya dan keagamaan, serta nilai-nilai kebersamaan yang kuat dalam kehidupan sosial masyarakat lokal.

Apabila dibandingkan dengan data PDRB per kapita sebelumnya, terdapat fenomena yang menarik di Provinsi DIY. Meskipun mempunyai rerata PDRB per kapita terendah di Pulau Jawa selama periode 2014–2021, DIY justru mencatatkan rata-rata indeks kebahagiaan tertinggi. Kondisi ini menunjukkan adanya paradoks pembangunan daerah, yaitu ketika tingkat kesejahteraan subjektif masyarakat tidak sepenuhnya sejalan dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang ditakar melewati PDRB per kapita. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa kebahagiaan masyarakat tidak hanya terpengaruh oleh faktor ekonomi, namun juga oleh faktor sosial, budaya, pendidikan, dan lingkungan yang berkembang di suatu daerah. Namun demikian, kinerja ekonomi tetap menjadi aspek penting karena berperan dalam membentuk kesempatan kerja, menaikkan pendapatan masyarakat, dan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

Meskipun tingkat kebahagiaan masyarakat Provinsi DIY tergolong tinggi, rendahnya PDRB per kapita menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi daerah masih menghadapi berbagai tantangan dalam menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih besar. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya perlu dilihat dari aspek kesejahteraan subjektif masyarakat, tetapi juga dari kemampuan perekonomian daerah dalam menghasilkan output yang

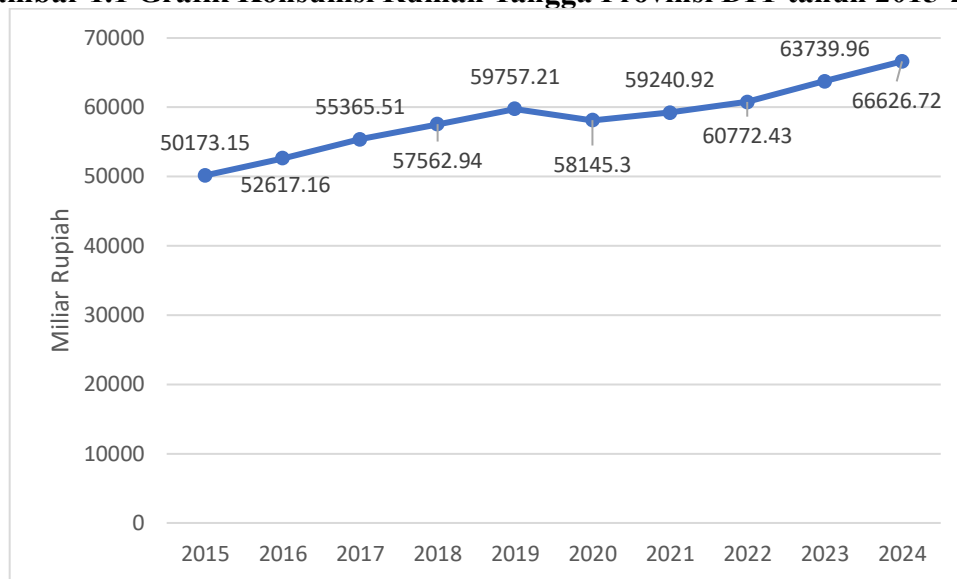
berkelanjutan. Sehingga, dibutuhkan analisis terkait faktor-faktor yang memengaruhi PDRB sebagai indikator utama kinerja ekonomi daerah. Dalam perspektif teori permintaan agregat, pembentukan output ekonomi dipengaruhi oleh berbagai komponen pengeluaran, terutama konsumsi rumah tangga, investasi, beserta pengeluaran pemerintah. Dengan demikian, ketiga faktor tersebut menjadi penting untuk dikaji dalam menjelaskan dinamika PDRB di Provinsi DIY.

Dalam perspektif ekonomi regional, peningkatan kinerja ekonomi daerah yang tercermin melalui PDRB dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut teori permintaan agregat Keynesian, tingkat output ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh keseluruhan pengeluaran yang tersusun dari konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor neto (Rohman dkk., 2024). Sehingga, untuk mengerti faktor-faktor yang memengaruhi kinerja ekonomi Provinsi DIY, penelitian ini berfokus pada konsumsi rumah tangga, investasi, beserta belanja modal sebagai komponen yang secara teoritis berkontribusi terhadap pembentukan PDRB daerah. Ketiga komponen permintaan agregat ini memiliki potensi untuk saling memperkuat melalui efek multiplier jika dikelola secara sinergis, namun ketidakefektifan salah satu komponen dapat menciptakan *domino effect* yang menekan PDRB secara keseluruhan, sehingga memerlukan analisis empiris mendalam untuk mengidentifikasi pola hubungan kausal dan besaran pengaruh relatif antar variabel terhadap kinerja ekonomi regional Provinsi DIY.

Menurut Hutagaol dkk., (2024) konsumsi mengacu pada pemanfaatan barang beserta jasa guna mencukupi keperluan manusia. Rumah tangga mengalokasikan pendapatan mereka untuk berbagai kebutuhan, dengan sebagian besar dialokasikan untuk konsumsi, yakni pembelian barang beserta jasa guna

mencukupi keperluan beserta hasrat. Berkaitan dengan ini, konsumsi rumah tangga mengacu pada pengeluaran rerata guna makanan serta barang non-makanan di daerah perkotaan beserta pedesaan. Proporsi pengeluaran makanan yang tinggi mengindikasikan rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga. Seiring meningkatnya pendapatan, porsi alokasi untuk konsumsi makanan menurun relatif terhadap pengeluaran non-makanan lainnya, sehingga rasio pengeluaran makanan yang rendah menjadi indikator kesejahteraan rumah tangga yang lebih baik.

Secara teoritis, konsumsi rumah tangga ialah unsur terbesar dalam pembentukan PDRB serta menjadi motor utama aktivitas ekonomi regional. Teori konsumsi Keynes menekankan bahwa konsumsi ditentukan oleh pendapatan disposabel, dimana kenaikan pendapatan akan memicu kenaikan konsumsi meskipun tidak sebanding satu banding satu (Saibana dkk., 2024). Dalam hal Provinsi DIY, peningkatan pendapatan dan aktivitas ekonomi misalnya melalui berkembangnya sektor pariwisata dan pendidikan akan mendorong kenaikan konsumsi rumah tangga, baik dalam bentuk pengeluaran guna keperluan pokok maupun keperluan sosial dan rekreatif. Studi di Provinsi Jawa Timur oleh Efendi dan Rachmawati, (2024) menemukan bahwa konsumsi rumah tangga berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB. Studi tersebut mempertegas pentingnya memahami pola konsumsi sebagai salah satu penentu utama dinamika PDRB. Namun, banyak penelitian tersebut belum secara khusus menelaah bagaimana karakter budaya dan struktur sosial, seperti yang terjadi di Provinsi DIY, membentuk pola konsumsi dan pada gilirannya memengaruhi PDRB.

Gambar 1.1 Grafik Konsumsi Rumah Tangga Provinsi DIY tahun 2015-2024

Sumber: BPS D.I. Yogyakarta, 2025 (data diolah)

Berlandaskan gambar 1.1 data konsumsi rumah tangga di Provinsi DIY periode 2015–2024 memperlihatkan pola fluktuatif dengan tiga fase yang jelas. Pada periode 2015–2019 konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan yang relatif stabil seiring pertumbuhan ekonomi yang kuat. Kenaikan konsumsi ini didorong oleh penambahan jumlah mahasiswa yang menempuh pendidikan di Provinsi DIY yang menggapai lebih dari 200 ribu orang per tahun, festival budaya yang rutin digelar seperti Batik Festival dan Jogja *Night* Festival yang menarik wisatawan domestik dan mancanegara, serta pertumbuhan usaha mikro dan kecil yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Pada tahun 2020 berlangsung penyusutan konsumsi yang signifikan sebab pandemi *Covid-19* yang menahan tindakan pariwisata, pendidikan tatap muka, dan pertemuan sosial. Penurunan konsumsi tersebut beriringan dengan kontraksi PDRB pada tahun yang sama, menegaskan eratnya hubungan antara konsumsi rumah tangga dan kinerja ekonomi regional.

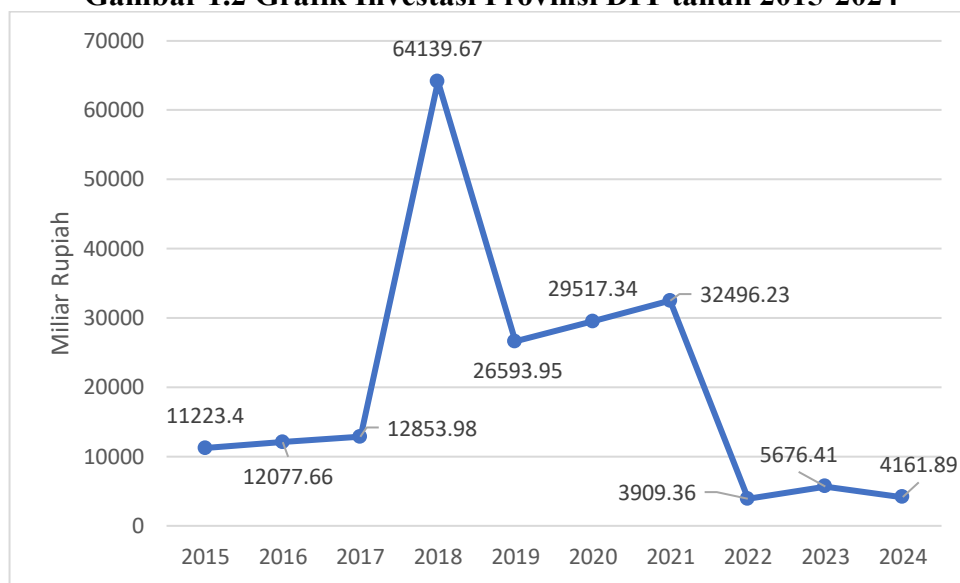
Kemudian pada periode 2021–2024 konsumsi rumah tangga kembali mengalami kenaikan seiring pelonggaran pembatasan sosial, kembalinya aktivitas

kuliah *luring*, meningkatnya wisata domestik, dan pulihnya kegiatan berkumpul masyarakat (Amelia, Sutanto dan Fadlli, 2025). Fenomena ini menandakan bahwa konsumsi rumah tangga di Provinsi DIY terpengaruh besar oleh dinamika sektor jasa dan pariwisata, berbeda dari wilayah dengan struktur ekonomi berbasis industri besar atau komoditas primer. Sehingga, variabel konsumsi rumah tangga penting guna menganalisis pengaruhnya terhadap PDRB karena konsumsi merupakan komponen terbesar dalam permintaan agregat yang secara langsung menentukan tingkat output ekonomi regional, dan pemahaman tentang faktor budaya serta struktur sosial yang membentuk pola konsumsi di Provinsi DIY menjadi konteks penting dalam menjelaskan pergerakan PDRB daerah dengan karakteristik ekonomi berbasis pendidikan dan pariwisata.

Selain konsumsi rumah tangga, investasi menjalankan peran krusial sebagai lokomotif utama perekonomian. Peningkatan modal melalui investasi merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Domar menerangkan bahwa peningkatan investasi memungkinkan perekonomian dalam menciptakan lebih banyak barang beserta jasa, sehingga meningkatkan hasil produksi, memicu ekspansi ekonomi secara keseluruhan (Apriliansah dan Suyatno, 2024). Peran penting investasi dalam pembangunan ekonomi terletak pada kemampuannya untuk menghasilkan modal yang secara langsung berdampak pada tingkat produksi di suatu wilayah. Kehadiran investasi akan merangsang aktivitas ekonomi, membuka lebih luas lapangan pekerjaan, dan sehingga dapat menaikkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Investasi dapat berupa Investasi Domestik (PMDN) dan Investasi Asing (PMA) (Rahman B., 2022). Studi di Provinsi Jawa Tengah oleh Widiyarto dan Arianti, (2022) menemukan bahwa investasi berpengaruh terhadap

PDRB, sejalan dengan peran investasi sebagai katalisator pertumbuhan. Namun, studi di Provinsi Sumatera Utara oleh Jessica Ng, Angelina dan Alvia, (2022) menemukan bahwa investasi tidak berpengaruh terhadap PDRB. Dari penelitian tersebut mampu dikondisikan bahwa keterkaitan antara investasi dan PDRB bersifat kontekstual dan dipengaruhi struktur ekonomi lokal setempat.

Gambar 1.2 Grafik Investasi Provinsi DIY tahun 2015-2024



Sumber: BPS D.I. Yogyakarta, 2025 (data diolah)

Berlandaskan gambar 1.2 investasi di Provinsi DIY selama periode 2015–2024 mencerminkan pola yang berfluktuasi. Pada periode 2015–2018 investasi mengalami peningkatan yang didorong oleh meningkatnya daya tarik Provinsi DIY sebagai pusat pendidikan, pariwisata, dan jasa. Selain itu, pembangunan berbagai infrastruktur strategis seperti Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) di Kabupaten Kulon Progo turut meningkatkan konektivitas wilayah dan memperbaiki iklim usaha sehingga mampu menarik minat investor. Pada tahun 2019 investasi mengalami penurunan yang dapat dikaitkan dengan kecenderungan investor untuk lebih berhati-hati dalam merealisasikan proyek baru setelah selesainya beberapa

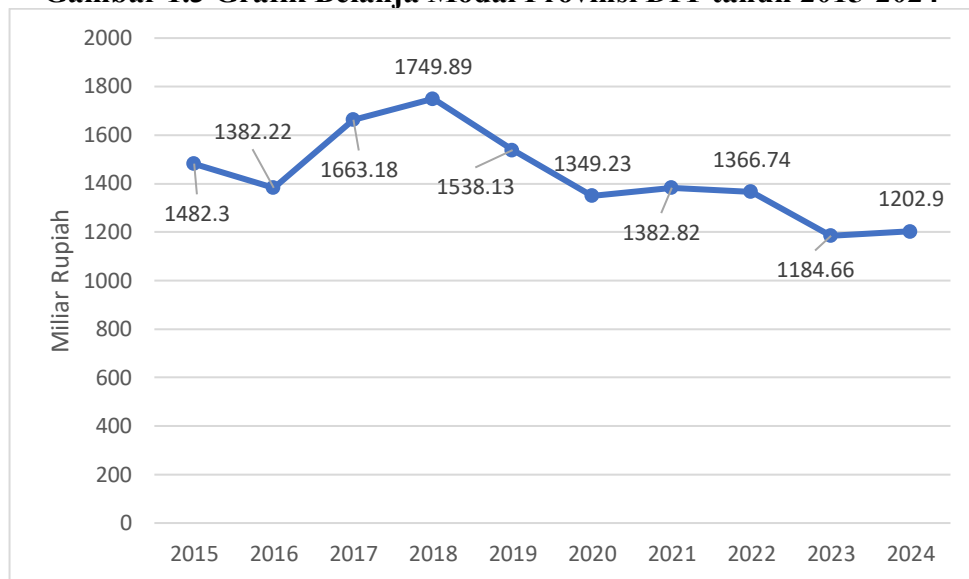
proyek strategis serta adanya ketidakpastian ekonomi global yang memengaruhi keputusan investasi.

Selanjutnya, pada tahun 2020–2021 investasi kembali mengalami peningkatan. Meskipun pandemi *Covid-19* menimbulkan tekanan terhadap aktivitas ekonomi, berbagai kebijakan pemulihan ekonomi dan stimulus pemerintah mampu menjaga iklim investasi. Selain itu, kebutuhan dunia usaha untuk mempertahankan operasional serta mempersiapkan pemulihan ekonomi mendorong tetap berlangsungnya aktivitas penanaman modal di Provinsi DIY. Adapun pada 2022–2024 investasi kembali mengalami penurunan yang menunjukkan adanya normalisasi pascapandemi, berkurangnya proyek investasi besar, dan belum stabilnya arus modal masuk. Fenomena ini menegaskan bahwa investasi penting dianalisis pengaruhnya terhadap PDRB sebab bertindak langsung dalam memperluas kapasitas produksi, membentuk lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja modal yakni sebagian dari pengeluaran langsung pemerintah daerah dan dimanfaatkan untuk memperoleh barang beserta jasa guna meningkatkan aset tetap atau kekayaan daerah, dengan manfaat jangka panjang yang melampaui satu periode anggaran. Jenis pengeluaran ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan memainkan peran penting dalam meningkatkan layanan publik, sehingga pemerintah daerah harus fokus pada optimalisasi struktur anggaran mereka dengan meningkatkan porsi belanja modal dibandingkan pengeluaran rutin, yang biasanya lebih boros dan kurang efisien. Belanja modal berfokus pada pembangunan dan peningkatan infrastruktur di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lainnya. Pada akhirnya, hal ini membantu mendorong

pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas sektor publik. Studi di Provinsi NTB oleh Savira, Wahyunadi dan Fatimah, (2022) menjelaskan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap PDRB. Hal ini menegaskan perlunya strategi penganggaran yang bijaksana agar belanja modal terus menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi daerah.

Gambar 1.3 Grafik Belanja Modal Provinsi DIY tahun 2015-2024



Sumber: Portal APBD, 2025 (data diolah)

Berlandaskan Gambar 1.3, data belanja modal Provinsi DIY periode 2015–2024 memperlihatkan pola yang berfluktuasi dengan kecondongan menurun dalam jangka panjang. Pada periode 2015–2018 belanja modal mengalami peningkatan yang didorong oleh upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan infrastruktur publik, seperti sarana pendidikan, kesehatan, transportasi, serta fasilitas pendukung sektor pariwisata. Peningkatan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, pada tahun 2019 belanja modal mulai menurun seiring meningkatnya kebutuhan belanja operasional dan pelayanan publik rutin sehingga ruang fiskal untuk pembangunan aset tetap menjadi lebih

terbatas. Selanjutnya, pada tahun 2020–2021 belanja modal kembali mengalami penurunan sebab pandemi Covid-19 yang memicu pemerintah melakukan *refocusing* anggaran untuk penanganan kesehatan, bantuan sosial, dan program pemulihan ekonomi. Memasuki periode 2022–2024, belanja modal masih berada pada tingkat yang relatif rendah karena pemerintah daerah lebih memprioritaskan konsolidasi fiskal dan pemenuhan belanja wajib pascapandemi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa alokasi belanja modal sangat dipengaruhi oleh kondisi fiskal dan kebijakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, belanja modal penting dianalisis pengaruhnya terhadap PDRB karena melalui pembangunan infrastruktur beserta pengadaan fasilitas publik, belanja modal dapat meningkatkan produktivitas ekonomi, memperlancar aktivitas produksi dan distribusi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Urgensi studi ini berada pada pentingnya mengerti faktor-faktor yang memengaruhi kinerja ekonomi regional melalui konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja modal terhadap PDRB di Provinsi DIY, terutama mengingat adanya paradoks pembangunan dimana memiliki indeks kebahagiaan masyarakat tertinggi di Pulau Jawa namun PDRB per kapita terendah. Studi ini dinantikan mampu menyumbangkan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam optimalisasi konsumsi rumah tangga, penguatan iklim investasi, dan manajemen strategis belanja modal yang tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, namun juga berfokus pada kenaikan kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan tingkat kebahagiaan yang sudah tinggi. Selain itu, hasil dari studi ini mampu menjadi dasar untuk mengoptimalkan potensi sektor pariwisata, pendidikan, dan jasa sebagai sumber utama pendapatan daerah, yang akan mendukung

pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi DIY dengan karakteristik ekonomi berbasis pendidikan dan pariwisata. Peningkatan PDRB yang optimal melalui ketiga variabel tersebut dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam mengembangkan perekonomian daerah serta berperan besar dalam menopang pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi DIY.

Meskipun hubungan antara konsumsi rumah tangga, investasi, belanja modal, dan PDRB telah banyak diteliti, hasil studi sebelumnya masih memperlihatkan inkonsistensi. Beberapa studi menemukan bahwa konsumsi rumah tangga, investasi, beserta belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB, sedangkan studi lainnya memperlihatkan bahwa tidak seluruh variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Studi Hikmah dkk., (2025) menjelaskan bahwa investasi serta konsumsi rumah tangga berpengaruh positif terhadap 34 Provinsi di Indonesia. Studi Linda dkk., (2025) juga menjelaskan bahwa belanja modal dan investasi berpengaruh positif terhadap PDRB di Pulau Sulawesi. Namun studi lain memperlihatkan hal yang berbeda. Studi Saputra dan Rusdi, (2024) memperlihatkan bahwa investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Pulau Kalimantan. Studi Ferdiansah, Yusup dan Sayudin, (2022) juga memperlihatkan bahwa konsumsi rumah tangga berpengaruh negatif terhadap PDRB Indonesia. Perbedaan hasil tersebut mengisyaratkan bahwa pengaruh masing-masing variabel terhadap PDRB sangat dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi wilayah yang diteliti. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu hanya menguji satu atau dua variabel secara terpisah sehingga belum mampu menjelaskan kontribusi relatif konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja modal secara simultan terhadap PDRB. Penelitian yang

secara khusus mengkaji ketiga variabel tersebut pada Provinsi DIY dengan karakteristik ekonomi yang didominasi sektor pendidikan, pariwisata, dan jasa juga masih relatif terbatas, terutama yang mencakup periode pemulihan ekonomi pascapandemi hingga tahun 2024.

Berlandaskan celah studi tersebut, kebaruan (*novelty*) studi ini berada pada beberapa aspek. Pertama, studi ini mengintegrasikan secara simultan tiga determinan utama, yakni konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja modal dalam satu kerangka empiris guna mendeskripsikan pertumbuhan PDRB di Provinsi DIY. Pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif disejajarkan dengan studi sebelumnya yang umumnya hanya menguji satu atau dua variabel secara terpisah.

Kedua, studi ini memanfaatkan data panel yang memuat lima kabupaten/kota di Provinsi DIY selama periode 2015–2024. Pemanfaatan data panel memungkinkan analisis yang lebih komprehensif sebab mampu menangkap variasi karakteristik antarwilayah sekaligus perubahan kondisi ekonomi dari waktu ke waktu, sehingga menghasilkan estimasi yang lebih akurat dipadankan dengan penggunaan data *cross section* atau *time series* secara terpisah.

Ketiga, studi ini memuat periode sebelum pandemi *Covid-19*, saat pandemi, hingga pascapandemi. Cakupan periode tersebut memungkinkan studi mendeskripsikan dinamika serta ketahanan perekonomian daerah dalam menghadapi guncangan ekonomi, lantas dapat membagikan pandangan yang lebih utuh terkait pengaruh konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja modal terhadap PDRB pada berbagai kondisi ekonomi.

Keempat, studi ini berfokus pada Provinsi DIY yang mempunyai karakteristik ekonomi yang khas, yakni didominasi oleh sektor pendidikan, pariwisata, dan jasa, serta menghadapi fenomena paradoks pembangunan berupa tingginya tingkat kebahagiaan masyarakat meskipun memiliki PDRB per kapita terendah di Pulau Jawa. Karakteristik tersebut menjadikan Provinsi DIY sebagai wilayah yang menarik untuk mengkaji determinan pertumbuhan ekonomi dari perspektif regional.

Kelima, studi ini juga dinantikan menyumbang kontribusi terhadap pengembangan kepustakaan ekonomi regional dengan menyediakan bukti empiris mengenai hubungan konsumsi rumah tangga, investasi, beserta belanja modal terhadap PDRB pada tingkat kabupaten/kota menggunakan pendekatan data panel. Temuan studi ini dinantikan mampu memperkaya sumber empiris terkait aspek-aspek yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya pada wilayah yang memiliki karakteristik ekonomi berbasis pendidikan, pariwisata, dan jasa seperti Provinsi DIY.

Berlandaskan penelitian terdahulu dan deskripsi latar belakang diatas, peneliti terdorong untuk menganalisis secara komprehensif pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap PDRB guna memberikan pemahaman empiris yang lebih mendalam dengan judul **"Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi, dan Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan pemaparan fenomena dan permasalahan diatas lantas rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Konsumsi Rumah Tangga berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi DIY?
2. Apakah Investasi berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi DIY?
3. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi DIY?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah diatas, tujuan pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah konsumsi rumah tangga berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi DIY.
2. Untuk menganalisis apakah investasi berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi DIY.
3. Untuk menganalisis apakah belanja modal berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi DIY.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam sebuah penelitian, batasan berguna untuk mempersempit masalah yang diteliti. Berikut batasan masalah yang menjadi fokus utama dalam studi ini:

1. Studi ini menggunakan PDRB sebagai variabel terikat sementara untuk konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja modal sebagai variabel bebas.
2. Studi ini fokus pada di wilayah Provinsi DIY yang memuat Kabupaten Kulon Progo, Bantul, Gunungkidul, Sleman, beserta Kota Yogyakarta.
3. Studi ini memanfaatkan metode regresi data panel selama periode 2015-2024 untuk melihat bagaimana dinamika ekonomi di Provinsi DIY.

1.5 Manfaat Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah dan tujuan studi, lantas manfaat yang ingin digapai peneliti yakni sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, studi ini dinantikan mampu menyumbangkan pandangan teoritis, menjadi referensi ilmiah, serta memperkaya kajian tentang pengaruh konsumsi rumah tangga, investasi, serta belanja modal terhadap PDRB di Provinsi DIY.
2. Bagi universitas, penelitian ini dapat memperkaya kontribusi akademik di bidang ekonomi pembangunan dan perencanaan regional, sekaligus meningkatkan mutu pendidikan serta kegiatan penelitian. Penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan bagi studi lanjutan terkait dinamika pengaruh konsumsi rumah tangga, investasi, serta belanja modal terhadap perekonomian daerah.
3. Bagi pemerintah, hasil studi ini mampu menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih efektif, khususnya terkait penguatan konsumsi rumah tangga, investasi, serta belanja modal untuk mendorong peningkatan PDRB. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengungkap fenomena ekonomi masyarakat Provinsi DIY, sehingga memberikan solusi optimal dalam mengatasi tantangan pembangunan sosial-ekonomi daerah.